

# Tinjauan Mata Kuliah

Mata kuliah Hukum dan Administrasi Perencanaan (PWKL4204) dengan bobot 3 sks dikemas untuk mahasiswa Program Studi S1 Perencanaan Wilayah dan Kota, Universitas Terbuka. Pemahaman terhadap pengetahuan tentang hukum dan administrasi perencanaan ini amat penting agar setiap lulusan S1 Perencanaan Wilayah dan Kota dapat mengambil suatu keputusan berdasarkan hukum yang tepat ketika bekerja dalam bidang perencanaan suatu wilayah dan kota. Secara garis besar, mata kuliah ini membahas pemahaman secara benar tentang dasar hukum administrasi perencanaan, terkait dengan administrasi dan manajemen pembangunan, sistem perencanaan pembangunan, penyusunan tata ruang, kelembagaan dan pembiayaan pembangunan, pengendalian pemanfaatan ruang dan pengawasan teknis, peraturan zonasi, izin pemanfaatan ruang, serta integrasi perencanaan pembangunan dan penataan ruang.

Bahan ajar mata kuliah Hukum dan Administrasi Perencanaan (PWKL4204) ini terdiri dari 9 (sembilan) modul, yaitu: (1) Pemahaman Dasar Tentang Hukum dan Administrasi Perencanaan Wilayah dan Kota, (2) Administrasi dan Manajemen Pembangunan, (3) Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, (4) Pedoman Penyusunan Tata Ruang, (5) Kelembagaan dan Pembiayaan Pembangunan, (6) Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Teknis, (7) Peraturan Zonasi, (8) Izin Pemanfaatan Ruang serta Mekanisme Insentif dan Disinsentif dan (9) Integrasi Perencanaan Pembangunan dan Penataan Ruang.

Secara rinci bahasan tiap-tiap modul adalah sebagai berikut:

- Modul 1** : Membahas tentang administrasi pembangunan dan perkembangan praktik perencanaan, dan hukum perencanaan wilayah dan kota.
- Modul 2** : Membahas tentang konsep administrasi dan manajemen sektor publik, dan manajemen strategis serta analisis kebijakan publik dan manajemen konflik.
- Modul 3** : Membahas tentang konsep perencanaan pembangunan, kewenangan dan tugas kelembagaan manajemen pembangunan wilayah dan kota, organisasi untuk perencanaan pembangunan, dan pemikiran dan tuntutan baru tentang kewenangan dan tugas kelembagaan manajemen pembangunan.
- Modul 4** : Membahas tentang uraian dan pedoman penyusunan rencana tata ruang wilayah kabupaten dan kota.
- Modul 5** : Membahas tentang kelembagaan pembangunan dan penataan ruang, dan pembiayaan pembangunan daerah.
- Modul 6** : Membahas tentang konsep pengendalian dan pengawasan teknis pemanfaatan ruang.

- Modul 7** : Membahas tentang konsep peraturan zonasi serta tata cara penyusunan peraturan zonasi, yang meliputi: metode pendekatan penyusunan peraturan zonasi, tahap penyusunan peraturan zonasi, dan tata cara pelaksanaan peraturan zonasi.
- Modul 8** : Membahas tentang perizinan dalam penataan ruang yang meliputi: jenis-jenis perizinan, mekanisme perizinan, serta implementasi studi kasus izin lokasi di kota Bandung. Pada kegiatan belajar berikutnya membahas tentang mekanisme insentif dan disinsentif yang meliputi: definisi, prasyarat dan bentuk-bentuk perangkat insentif dan disinsentif, serta landasan kewenangan.
- Modul 9** : Mengulas tentang hal-hal pokok terkait dengan keintegrasian dokumen rencana pembangunan (RPJPN/RPJMN/RPJPD/ RPJMD) dan rencana tata ruang wilayah (RTRW). Materi ini meliputi: pengertian, dasar hukum, dan permasalahan integrasi dokumen perencanaan pembangunan dan tata ruang, serta prinsip dasar, langkah-langkah dan strategi integrasi dokumen perencanaan pembangunan dan tata ruang.

Bahan ajar yang terdiri dari 9 (sembilan) modul ini dirancang dengan harapan mahasiswa dapat mempelajari modul ini selesai tepat pada waktunya. Ketekunan Anda mempelajari dan menyelesaikan tugas-tugas yang harus dikerjakan dalam modul ini merupakan harapan kami agar memperoleh kesiapan dalam menghadapi ujian akhir semester dan meraih prestasi nilai yang optimal.

Untuk memudahkan Anda dalam mempelajari modul ini, silakan Anda ikuti Peta Kompetensi berikut ini.

**Peta Kompetensi**  
**PWKL4204/Hukum dan Administrasi Perencanaan/3 sks**

